



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN UJICOBAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

Langkah Ke: 7

ANALISIS HASIL UJICOBAN

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM**

2007



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGEMBANGAN DAN UJICOBAL MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

Langkah Ke: 7

ANALISIS HASIL UJICOBAL

NO. INDUK
NO. KLASIFIKASI
TGL. TERIMA
DARI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT KURIKULUM

2007

PENGEMBANGAN DAN UJICoba MODEL- MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR

LAPORAN KEGIATAN LANGKAH 7

Analisis Hasil Ujicoba

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional, yaitu dalam pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Yang juga ditegaskan dalam UU No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “ setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di *daerah terpencil atau terbelakang*, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan *tidak mampu dari segi ekonomi* sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 32 ayat (2) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki *kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran* karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus. Bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan yang dikarenakan sosial ekonomi rendah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang utamanya adalah melakukan kajian konsep tentang pendidikan layanan khusus. Kajian ini melibatkan para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam mengupas berbagai persoalan pendidikan yang dialami oleh kelompok masyarakat tersebut. Kajian ini juga melibatkan para pakar dan praktisi berbagai keahlian untuk mencari bentuk-bentuk atau model-model kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan persoalan yang dialami oleh masyarakat tersebut. Dalam proses pengembangan model kurikulum layanan khusus ini diperlukan kajian yang cermat dan tepat sasaran, sehingga untuk kebutuhan validitas data dan model yang dihasilkan, para pengembang kurikulum ini harus tinggal/menenetap di daerah tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan model kurikulum yang sesuai untuk kebutuhan layanan khusus di tingkat pendidikan dasar.

C. Hasil yang Diharapkan

Serangkaian kegiatan ini akan menghasilkan 4 model kurikulum pendidikan layanan khusus untuk jenjang pendidikan dasar terdiri atas:

- Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah terpencil
- Model kurikulum untuk peserta didik yang tinggal di daerah perbatasan
- Model kurikulum untuk peserta didik sosial-ekonomi rendah
- Model kurikulum untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.

D. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari kerja per tahapan pelaksanaan dengan inti kegiatan dalam bentuk Workshop kerja kelompok, kerja individu, dan diskusi fokus.

E. Waktu, Tempat dan Peserta Kegiatan

Waktu, tempat dan peserta kegiatan terlampir

F. Daftar Acara

Susunan acara kegiatan adalah sebagai berikut:

WAKTU	ACARA	Keterangan
Hari I	- Pengarahan dari Pimpinan - Penjelasan kegiatan dari koordinator - Diskusi - Tanya Jawab	Pusat Kurikulum Penanggung Jawab Kegiatan
Hari II	- Kerja individu/kelompok - Pembahasan	Peserta
Hari III	Kerja individu/kelompok	Peserta
Hari IV	- Progress Check - Diskusi	Tim Pusat Kurikulum
Hari V	- Penyempurnaan - Penutupan	Peserta

G. Daftar Bahan

Kegiatan ini menggunakan beberapa bahan antara lain:

- ATK (Ball point, map, kertas untuk print out hasil)
- Referensi yang relevan

H. Hasil yang Dicapai

Terlampir

LAMPIRAN

HASIL ANALISIS UJI COBA MODEL KURIKULUM BAGI PESERTA DIDIK YANG MENGALAMI KESULITAN BELAJAR DI SD/MI

NO.	PERMASALAHAN	DAERAH	
		Garut	Boyolali
1.	Keterbacaan	Responden yang terdiri dari Guru dan Kepala Sekolah menyatakan paham tentang Model Kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar	Responden sebanyak 19 orang menyatakan paham tentang Model Kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar
2.	Keterlaksanaan	Menurut responden sebanyak 23 (100%) menyatakan bahwa kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar dapat dilaksanakan.	Menurut sebagian besar responden Kurikulum bagi Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar dapat dilaksanakan. Beberapa responden menyatakan keberatan karena dengan membuat PPI berarti Guru akan memerlukan lebih banyak waktu. Sedangkan saat ini saja dalam membuat silabus dan RPP agak sulit (waktunya).
3.	Pengertian Kesulitan Belajar	Setengah dari responden sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar, sedangkan yang sebagian lagi masih perlu pemahaman	Sebagian besar responden sudah mengetahui tentang kesulitan belajar. Ada sekolah yang melaksanakan kelas inklusif.

		lebih lanjut tentang kesulitan belajar	
4.	Penanganan bagi peserta didik yang berkesulitan belajar	Semua responden (100%) menyatakan bahwa perhatian khusus merupakan salah satu cara dalam menangani peserta didik kesulitan belajar	Sebagian besar responden (80%) menyatakan cara menangani peserta didik kesulitan belajar yaitu dengan melakukan pendampingan
5.	Setting pembelejaran	Sebagian besar responden menyatakan bahwa setting pembelajaran untuk peserta didik kesulitan belajar sebaiknya bersatu dengan peserta didik dalam satu kelas sehingga tidak ada perbedaan	Sebanyak 60 % responden menyatakan bahwa setting pembelajaran yang sebaiknya untuk peserta didik kesulitan belajar yaitu bersatu dengan peserta didik dalam satu kelas karena tidak ingin terjadi diskriminasi
6.	Koordinasi dengan orang tua	Hampir semua responden (1 abstain) menyatakan bahwa ada koordinasi dengan pihak orang tua yaitu dengan bertukar pikiran	Hampir semua responden (2 abstain) menyatakan bahwa sudah ada koordinasi dengan orang tua karena sudah terbentuk paguyuban orang tua peserta didik
7.	Model Kurikulum?	Sebagian besar responden menyatakan bahwa kurikulum yang sebaiknya untuk peserta didik kesulitan belajar yaitu kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan yang dapat menggali potensi anak,	Menurut responden kurikulum untuk peserta didik kesulitan belajar yaitu kurikulum yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak.



**PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM
PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN DASAR UNTUK DAERAH TERPENCIL**

ANALISIS MODEL

**Penanggung Jawab : Kabid Kurikulum Pendidikan Non Formal
Koordinator: Suci Paresti**

**PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA 2007**



PUSAT KURIKULUM
BALITBANG, DEPDIKNAS
2007

HASIL KEGIATAN ANALISIS DATA

PENGEMBANGAN MODEL-MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL JENJANG PENDIDIKAN DASAR

A. PELAKSANAAN

Waktu : 5 hari

Tempat : Cisarua – Bogor.

Peserta : terdiri dari pengembang kurikulum, staf LPMP dan guru.

No	Nama	Instansi	Keterangan
1	Suci Paresti	Pusat Kurikulum	Koordinator PMK PLK daerah terpencil
2	Widyaningtyas S.,SE,MM	LPMP DKI Jakarta	Tim PLK Terpencil
3	Dra Eko Lestariyanti, MPd	SDN Pondok Bambu 14 Jakarta Timur	Tim PLK Terpencil
4	Dewi Sri Handayani, SPd	SDI Al Izhar Pondok Labu	Tim PLK Terpencil

B. DATA UJICOBAA DRAFT MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS PENDIDIKAN DASAR DI DAERAH TERPENCIL

Data ujicoba yang didapat dari lapangan meliputi:

1. data/masukkan keterbacaan dan editing dari segi bahasa maupun konsep pada draft model kurikulum pendidikan layanan khusus daerah terpencil. Ada sebanyak 25 responden/daerah yang memberikan masukan pada draft model ini.
2. data kuesioner yang dijangkau melalui pengisian kuesioner oleh responden dan juga melalui diskusi fokus. Data kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang keterbacaan, keterlaksanaan, permasalahan/kendala implementasi terhadap model, kesesuaian KTSP dengan model dan saran/rekomendasi.
3. Penyusunan KTSP daerah terpencil sesuai dengan pengembangan model pada daerah ujicoba yaitu Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut-Jawa Barat dan Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau-Kalimantan Barat.

masyarakat di wilayah tertinggal/terpencil yang tersebar di seluruh Nusantara. Pembangunan ini secara spesifik ditujukan untuk memberdayakan masyarakat yang terbelakang, tertinggal dan terpencil agar terpenuhi hak dasarnya, sehingga dapat menjalankan aktivitasnya untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya.		III
Kondisi daerah yang masih relatif belum maju, tertinggal, terisolir dan terpencil sangat membutuhkan intervensi kebijakan pembangunan dari pemerintah, sehingga diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah ini. yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berkenaan dengan itu, pemerintah telah melakukan dengan berbagai terobosan pengentasan kemiskinan dan kebodohan ketertinggalan pada masyarakat di daerah terpencil, sehingga jurang ketertinggalan kesenjangan dengan masyarakat perkotaan tidak terlalu dalam jauh dan segera dapat diantisipasi diatasi. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain program Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dan Program Akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.	II III	III III II II
Namun, apa yang telah diprogramkan pemerintah belum terlaksana secara optimal dan belum dapat mencapai hasil yang diharapkan. Telah disadari bersama, pelaksanaan pendidikan di daerah-daerah terpencil selama ini masih jauh dari kondisi keberhasilan program yang diharapkan pemerintah. Akses informasi yang terbatas, keadaan alam yang tidak selalu menunjang, jarak tempuh yang relatif jauh untuk ke sekolah, letak permukiman penduduk yang berjauhan/terpencar, transportasi dan komunikasi yang sulit, lemahnya tingkat ekonomi masyarakat, dan masih melekatnya budaya yang menutup diri terhadap kemajuan peradaban, merupakan beberapa kendala utama yang membuat daerah terpencil tetap bergerak lamban dalam mencapai kemajuan. Sampai sekarang, masyarakat di daerah-daerah terpencil belum dapat menikmati pendidikan yang layak, bermutu, dan merata. Kenikmatan hasil-hasil pembangunan, kemajuan ilmu dan teknologi, serta berbagai kemudahan lainnya sebagian besar masih diterima sebagai kabar angin dari negeri dongeng saja.	II II	III
Pemerintah merasakan menyadari bahwa kondisi pendidikan negeri kita perlu terus dibenahi, dan tentunya diperlukan strategi yang tepat, terencana dan berkesinambungan (simultan). Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, pemerintah mencanangkan program Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada tahun 2006. Sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 32, PLK ini ditujukan bagi peserta didik siswa-siswa yang berada di daerah pelosok, terpencil, Komunitas Adat Terpencil (KAT), daerah konflik, maupun bekas bencana alam. Sasaran PLK ini adalah siswa-siswa peserta didik usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.	II I II II II	III II III
B. LANDASAN HUKUM 2. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 • ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan • ayat (2) mengharuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 • ayat (1) berbunyi: setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" • ayat (3) dinyatakan: warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 3. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 ayat 2, dijelaskan pendidikan layanan khusus ialah		

pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 4. Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada • Pasal 1, yang menyebutkan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya" • Pasal 48, pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. • Pasal 49, Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. • Pasal 53, ayat 1, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. • Pasal 53, ayat 2, Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan: • Pasal 19 Ayat 1 : Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik • Pasal 42, Ayat 1 : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22, 23, 24 Tahun 2006 tentang Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Pelaksanaan, salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk pendidikan layanan khusus.		
C. TUJUAN 1. Tujuan Umum Model ini dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan yang berada di daerah terpencil, tertinggal atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dan / atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi, dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. 6. Tujuan Khusus Pengembangan model ini secara khusus bertujuan: a. memberikan acuan bagi pejabat pemerintah daerah setempat dan masyarakat yang berkecimpung di bidang pendidikan untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan. b. memberdayakan guru yang ada di daerah terpencil untuk dalam mengembangkan strategi pengajaran dan pembelajaran (silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran), serta materi ajar sesuai dengan kondisi daerah. c. memberikan acuan secara umum, bagi guru dan ahli yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.	II I I II II	II II II II

D. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pengembangan model kurikulum pendidikan layanan khusus bagi peserta didik di daerah terpencil sebagai berikut: 1. Lingkup Daerah Lingkup daerah pengembangan kurikulum pendidikan layanan khusus adalah masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tidak diperbatasan. Maksud dari daerah terpencil tidak diperbatasan adalah daerah yang terisolasi secara geografis, baik di pegunungan, pulau-pulau terpencil, daerah pedalaman maupun daerah lepas pantai. 2. Lingkup Jenjang Pendidikan Lingkup jenjang pendidikan adalah pendidikan dasar (SD/MI)		
BAB II PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL 7. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERPENCIL Indikasi dari istilah daerah terpencil cenderung memberikan konotasi negatif dan gambaran kondisi daerah yang miskin, terisolir, terbelakang, tertinggal dan sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa pengertian daerah terpencil: 1. Prof. HAR Tilaar berpendapat bahwa daerah terpencil adalah daerah kepulauan atau daerah yang sukar dicapai dan memiliki kendala komunikasi, sehingga menjadi daerah yang relatif kurang efisien dalam pengembangan dan ketinggalan dibandingkan dengan daerah perkotaan atau pedesaan yang memiliki sarana komunikasi yang memadai. 2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "terpencil" dapat diartikan dengan terbelakang dan tertinggal. 3. Adapun berdasarkan Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal No 001/KWP/M-PDT/II/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PDT), daerah tertinggal/terpencil didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Suatu daerah dikategorikan sebagai daerah tertinggal/terpencil, didasarkan pada salah satu atau kombinasi dari hal-hal berikut: a. Kondisi geografis yang sulit; b. Kurang Tidak memiliki Potensi Sumberdaya Alam; c. Kualitas Sumberdaya Manusia Relatif Rendah; d. Prasarana dan Sarana yang terbatas; e. Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial; f. Efek Kebijakan Pembangunan yang tidak tepat.	II II III III III	I III III III
Dengan demikian, dari beberapa pengertian tersebut dapatlah disimpulkan pengertian dan karakteristik dari daerah terpencil, sebagai berikut : ▪ Pengertian Daerah terpencil adalah daerah yang terisolasi secara geografis, yaitu di pulau-pulau terpencil, di pegunungan, di daerah pedalaman, maupun di daerah lepas pantai, dan merupakan daerah terpencil tidak diperbatasan. ▪ Karakteristik daerah terpencil, antara lain: a. daerah yang memiliki kondisi geografis yang sulit dicapai, seperti letak permukiman penduduk yang berjauhan/terpencar b. memiliki kendala akses komunikasi c. sarana prasarana (akses transportasi) yang terbatas, dan d. daerah yang wilayahnya relatif sulit untuk berkembang, baik itu karena potensi sumber daya alamnya, kualitas sumber daya manusia yang relatif rendah, lemahnya tingkat ekonomi masyarakat dan melekatnya budaya yang menutup diri terhadap kemajuan peradaban.	II IIII II	III

8. KENDALA PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL		
Pendidikan di daerah terpencil memiliki karakteristik tersendiri yang mungkin tidak dimiliki atau tidak terjadi di beberapa daerah perkotaan atau daerah yang memiliki akses informasi yang cukup baik. Berdirinya sekolah-sekolah di daerah tersebut pada awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan warga setempat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak para penduduk yang hijrah ke daerah yang lebih ramai, yaitu daerah perkotaan sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi pemerintah. Kondisi daerah terpencil memang memberikan beberapa kendala bagi para pendidik. Beberapa kendala yang ditimbulkan dari karakteristik daerah terpencil itu sendiri di antaranya adalah:	III IIII	II III
1. <i>Sulitnya akses informasi</i> Tentunya masalah ini merupakan masalah bagi perkembangan informasi guru dalam rangka memberikan layanan pendidikan dengan informasi terkini. Keteringgalan informasi menjadikan beberapa wilayah tertinggal dalam perkembangan kurikulum, strategi pengajaran dan pembelajaran, dan penanganan siswa peserta didik. Hal ini berdampak terhadap perkembangan akademik maupun non akademik siswa peserta didik.	III III	II II
2. <i>Kondisi perkembangan ekonomi yang kurang menjanjikan para pebisnis</i> Hal ini tentunya disebabkan berbagai hal, seperti keadaan alam di daerah terpencil yang tidak selalu menunjang, maupun masih melekatnya budaya menutup diri terhadap kemajuan peradaban. Kondisi ini menjadikan daerah terpencil semakin ditinggalkan oleh sebagian wirausahawan. Akibatnya, beberapa permasalahan kemudian muncul, sehingga banyak penduduk yang meninggalkan daerahnya untuk berpindah ke wilayah yang lebih menjanjikan. Akhirnya, tentu berdampak kepada dunia sekolah, di mana para siswanya peserta didik harus mengikuti ke mana orang tuanya pindah, sehingga sebagian wilayah kekurangan siswa peserta didik. Banyak sekolah yang memiliki hanya memiliki beberapa siswa peserta didik untuk kelas-kelas tertentu.	IIII III III III	III II II II
9. <i>Sulitnya akses sarana prasarana</i> Letak permukiman penduduk yang berjauhan/terpencar dan sulitnya akses jalan dan transportasi menuju sekolah di tempat terpencil membuat sebagian guru enggan untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurang menunjangnya sarana sanitasi dan kesehatan, membuat sebagian guru beralasan agar tidak ditempatkan di wilayah tersebut. Hal ini semakin menambah masalah bagi pendidikan, karena siswa peserta didik yang berada di wilayah tersebut bagaimanapun harus tetap mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.	III III	II II
4. <i>Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang rendah</i> Lemahnya tingkat sosial-ekonomi masyarakat merupakan kendala utama bagi daerah terpencil untuk tetap bergerak lamban dalam mencapai kemajuan. Dengan kondisi lingkungan masyarakat yang demikian, tentu saja tingkat perhatian dan partisipasi mereka untuk mengembangkan pendidikan sangat sulit diharapkan. Dengan begitu Akibatnya, keberadaan dan fungsi orangtua/Komite Sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik. Demikian pula berbagai konsep baru mengenai pembaruan manajemen pendidikan tentulah akan sulit tercapai mandu juga.	II IIII	II I III II
5. <i>belum meratanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di daerah terpencil.</i> Oleh karena itu, prioritas bantuan kepada sekolah-sekolah di daerah		

terpencil, tidak hanya dalam hal pemberian bantuan pendanaan tetapi juga pada pembinaan manajemennya. Semua ini dimaksudkan agar masyarakat pendidikan di daerah terpencil mampu mengimplementasikan konsep sebagai <i>stake holders</i> , karena berkaitan dengan implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (<i>School-Based Education</i>) atau Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat (<i>Community-Based Education</i>).	III III	III
10. PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERPENCIL Pelaksanaan pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil merupakan wujud implementasi dari pemerataan hak dan kesempatan bagi setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 53, ayat 1, dikatakan: pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.		
Selain itu, dengan mengacu pada pemikiran dari Prof HAR Tilaar, ada tiga aspek penting yang perlu dipertimbangkan sebagai titik tolak pelaksanaan pemberdayaan (<i>empowerment</i>) pendidikan di daerah terpencil. Pertama, pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil perlu dilakukan berdasarkan atas asas pemerataan pembangunan; Kedua, pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil juga perlu dilakukan berdasarkan atas asas peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan asas pertama. Jika tujuan ini tercapai, maka harkat dan martabat manusia Indonesia dengan sendirinya akan ikut terangkat. Kemudian pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak ada lagi yang berada di bawah garis kemiskinan absolut (<i>absolute poverty</i>). Berdasarkan data dari <i>United Nation Development Program</i> (UNDP), kualitas SDM (<i>Human Development Index</i>) negara Indonesia tidak lagi berada pada peringkat ke-77 dari 130 negara ASEAN (UNDP, Human Development Report 1990), tetapi menjadi ke-110 dari seluruh negara yang diteliti. (UNDP, Human Development Report 2005) Ketiga, pelaksanaan pemberdayaan pendidikan di daerah terpencil harus pula dilandasi dengan dasar nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme. Dengan adanya semangat kebangsaan dan kesadaran nasionalisme maka akan menjiwai gerak dinamika pembangunan bangsa secara nasional.		
Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pemberdayaan pendidikan di Indonesia ada dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 1. Faktor Internal meliputi jajaran dunia pendidikan, baik itu Depdiknas, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah. 11. Faktor Eksternal adalah masyarakat pada umumnya. Mengingat banyaknya permasalahan dalam pendidikan, pemerintah tidak akan sanggup mengatasi masalah pendidikan yang kronis dan tidak adil, jika masyarakat membiarkan pemerintah berjuang sendiri. Konsep pendidikan untuk semua (<i>education for all</i>), maka pemberdayaan pendidikan hendaknya menekankan, pendidikan adalah pada tanggung jawab bersama semua yaitu: pemerintah, masyarakat, orangtua, dan kalangan bisnis.	III III	II II
12. BENTUK PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL Salah satu usaha penting untuk menumbuhkan hidup itu menjadi yang utuh dan sempurna ialah pendidikan. Hidup mulai tumbuh dari dalam keluarga, dikembangkan terus dengan bantuan pendidikan di sekolah. Melalui proses pendidikan itu kepribadian anak dimatangkan, pertumbuhan		

fisiknya dipelihara dan berbagai kemampuan dilatih dan dikembangkan, akhirnya seorang anak menjadi manusia dewasa yang utuh dan mandiri. Proses atau langkah pengembangan tersebut sangat diperlukan bagi anak, terutama bagi anak yang berada di pedalaman dan daerah terpencil.		
Berkenaan dengan itu, pemerintah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan kebodohan keteringgalan pada masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain program Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara dan Program Akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Namun, apa yang telah diprogramkan pemerintah tersebut belum terlaksana secara optimal dan belum pula dapat mencapai hasil yang diharapkan, terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Masih ada 5,5% dari 25.857.117 anak usia 7-12 tahun dan 44,30% dari 13.095.083 anak usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun (paparan Dirjen PMPTK, 2006).	III	II
Sudah lama pemerintah mengembangkan model – model pendidikan layanan khusus terutama bagi daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau dengan sistem pendidikan konvensional, yaitu wilayah-wilayah bekas bencana, terpencil dan perbatasan. Pendidikan Layanan Khusus (PLK) merupakan bagian penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini sesuai dengan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 31 ayat 2, bahwa Pendidikan Layanan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, termasuk yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah konflik dan tidak mampu dari segi ekonomi.		
Pendidikan Layanan Khusus (PLK) adalah strategi kunci untuk menangani anak-anak tersebut pendidikan di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan akses komunikasi maupun sarana prasarana. Prinsip dasar dari Pendidikan Layanan Khusus adalah bahwa semua peserta didik anak harus memperoleh kesempatan untuk bersama-sama belajar. Hal ini berarti bahwa sekolah biasa/umum (SD reguler) harus diperengkapi diberikan fasilitas untuk agar dapat melihat dan menanggapi kebutuhan-kebutuhan siswa yang beranekaragam.	II III II	 II II
Adapun bentuk-bentuk pendidikan layanan khusus yang diperuntukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang sudah dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah, antara lain: 1. SD Terpencil Adalah SD yang lokasinya berada di daerah yang berpenduduk sedikit dengan letak permukiman penduduk yang berjauhan dan terpencar satu sama lain, serta penyediaan komunikasi yang sulit untuk dilakukan. 2. SD Kecil SD ini dibangun pada lokasi atau daerah yang mengalami kesulitan sarana transportasi dan komunikasi, serta berpenduduk yang relatif sedikit, sehingga jumlah murid peserta didik juga sedikit. Strategi pengajarannya dengan pendekatan pengajaran tradisional dan bertempat di Pusat Kegiatan Belajar. 3. SD Satu Guru Adalah lembaga pendidikan dasar yang memberikan layanan khusus pada anak usia SD di daerah yang berpenduduk sedikit dan terpencar (sangat jauh antara pemukiman rumah satu dengan lainnya), serta sulit dijangkau, dan sulit komunikasi, serta dan sulit transportasi. Strategi pengajarannya dengan pendekatan pengajaran tradisional dan dibantu oleh partisipasi masyarakat setempat. 4. SD Guru Kunjung Merupakan sekolah dasar kecil yang tempatnya di daerah terpencil, jumlah penduduknya kecil dan terpencar-pencar dengan pola pendidikan persekolahan guru kunjung berkunjung ke lokasi mereka peserta didik. Selain itu, masyarakat membantu sebagai tutor lokal dengan menggunakan pendekatan pembelajaran modul dan pendekatan pengajaran tradisional.	 III III II II III II II	 II II II

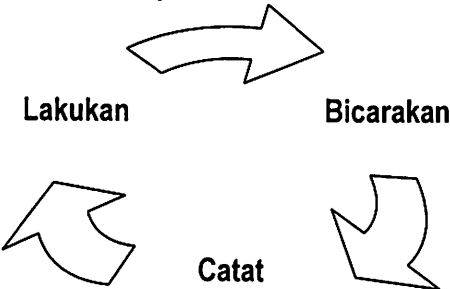
5. SD Konvensional Adalah sekolah dasar reguler yang terletak di daerah terpencil yang secara geografis mengalami hambatan-hambatan perkembangan secara normal. Strategi pengajarannya dengan pendekatan pengajaran tradisional/konvensional. 6. SD Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat Orangtua dan Guru) Diadakan di suatu tempat atau wilayah (misalnya pedesaan atau daerah terpencil) yang mempunyai anak peserta didik putus sekolah usia 7 – 12 tahun yang jumlahnya relatif banyak yang umumnya dikarenakan oleh faktor ekonomi yang rendah atau tidak mampu dan tidak dapat datang untuk belajar secara teratur di SD Konvensional. SD Pamong adalah lembaga pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan anak dengan mengikutsertakan masyarakat, orang tua, guru dan anak peserta didik itu sendiri. Strategi pembelajarannya dengan pendekatan modul/pembelajaran mandiri, pendekatan pengajaran tradisional, dan dibantu oleh partisipasi masyarakat dalam pengajaran.	III II II III	II II II
Bentuk-bentuk Pendidikan Layanan Khusus tersebut di atas merupakan inovasi pendidikan untuk yang ada di daerah terpencil. Sasarannya adalah siswa-siswa peserta didik usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Umumnya, strategi pengajaran pada bentuk pendidikan layanan khusus tersebut dengan menggunakan pendekatan tradisional dan modul yang dibantu dengan partisipasi masyarakat sebagai tutor. Tutor lokal membantu dalam mengawasi dan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, tempat belajar dan bahan/buku pelajaran. Keunikan dari bentuk pendidikan layanan khusus ini, metoda pengajarannya tidak melulu hanya bersifat akademis atau kognitif. Melainkan, dipadukan dengan pembekalan pengembangan diri, kecakapan hidup (<i>life skill</i>) dan muatan lokal yang tentunya disesuaikan potensi daerah, potensi anak peserta didik dan pendidik sebagai sumber daya pendidikan di daerah terpencil.	II III IIII IIII IIII III	II II II II III II
BAB III PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS UNTUK DAERAH TERPENCIL A. PENGERTIAN KURIKULUM Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dorongan bagi penyelenggara pendidikan untuk selalu melakukan proses perbaikan, modifikasi dan evaluasi pada kurikulum yang digunakan. Kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting di dalam proses pengendalian mutu pendidikan, karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi keluaran dari proses pendidikan. Kurikulum harus selalu diubah secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna dari waktu ke waktu.		
Berikut ini merupakan beberapa definisi kurikulum: 1. John Kerr mendefinisikan kurikulum sebagai semua kegiatan pembelajaran yang direncanakan dan digunakan sebagai pedoman oleh sekolah, baik pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok maupun individual, di dalam atau di luar kelas (dikutip dari Kelly 1983:10 dan Kelly 1999). 2. Dakir (2004) menerangkan, bahwa kurikulum berisikan tujuan, metode, media, evaluasi, bahan ajar dan berbagai pengalaman belajar. 3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.		

Simpanan dari definisi Kurikulum adalah pengorganisasian sekolah yang berisikan perencanaan tentang tujuan, metode, kegiatan pembelajaran, media, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.		
B. PENGEMBANGAN MODEL KURIKULUM UNTUK DAERAH TERPENCIL (sub judul dengan isi masih kurang nyambung) Pengembangan kurikulum akan berdampak terhadap kesiapan sekolah dan guru dalam implementasinya. Zais (1976) dalam buku <i>Curriculum: Principles and Foundations</i> mengemukakan delapan model pengembangan kurikulum. Namun dalam tulisan ini akan dibahas pada dua model saja yaitu Model Administratif (from the top down) dan model Grass-Roots (from the bottom up), karena sesuai dengan pengembangan kurikulum di Indonesia. 1. Model Administratif (<i>From the Top down</i>) Model ini dikembangkan dari atas ke bawah (<i>line staff</i>), dimana gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator pendidikan dengan menggunakan prosedur-prosedur administrasi yang bersifat sentralistik. 13. Model Grass-Roots (<i>From the Bottom Up</i>) Pengembangan kurikulum dalam model <i>grass-roots</i> ini berasal dari inisiatif/gagasan dari bawah, pelaksana kurikulum (guru atau sekelompok guru) pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan. Pengembangan dilakukan pada satu bidang studi atau beberapa bidang studi, baik pengembangan tujuan, bahan/materi, strategi/metode, dan evaluasi (komponen kurikulum). Hal ini dilakukan, baik diantara para guru sejenis atau berbagai jenis, ditambah masukan dari masyarakat dan bimbingan para administrator pendidikan.	IIII	III
Di Indonesia kini menganut sistem pemerintahan desentralistik, maka lebih tepat menggunakan model pengembangan kurikulum Grass-Roots (<i>from the bottom up</i>). Seorang pendidik atau penyelenggara pendidikan yang akan mengembangkan kurikulum dituntut untuk menguasai manajemen pengembangan kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, sebagai berikut: 1. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya 2. beragam dan terpadu 3. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 4. relevan dengan kebutuhan kehidupan 5. menyeluruh dan berkesinambungan 6. belajar sepanjang hayat 7. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah Adapun menurut Surjanto Budiwaluyo, manajemen pengembangan kurikulum yang perlu dipahami oleh pendidik adalah: 1. definisi kurikulum secara luas 2. mendesain dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan stakeholder 3. tahapan pengembangannya 4. output dari pengembangan kurikulum tersebut Berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak keterkaitan antara prinsip dan manajemen pengembangan kurikulum. Mempertimbangkan hal tersebut, pendidikan persekolahan untuk daerah terpencil kiranya perlu suatu model kurikulum pendidikan layanan khusus yang sesuai dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender.		

(seperti masih belum tuntas untuk sub ini !!)	III	III
14. KELAS RANGKAP SEBAGAI MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS UNTUK DAERAH TERPENCIL (ini menjadi sub judul b saja) Pemerintah merasakan bahwa kondisi pendidikan negeri kita perlu terus dibenahi, walau Wajar Dikdas 9 tahun telah lama digerakkan. Namun, proses penyelenggaraan pembelajaran di daerah terpencil belum dapat mengakomodir mengatasi keterbatasan dan mencerminkan karakteristik pendidikan untuk daerah terpencil. Disamping itu, dalam pengembangan kurikulum perlu juga memperhatikan pendekatan dan model rekonstruksi sosial untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat daerah terpencil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 19 ayat 1 : Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selama ini, proses pengajaran ataupun pembelajaran dari berbagai bentuk-bentuk pendidikan layanan khusus yang telah ada belum mencerminkan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) bagi siswa peserta didik, sehingga kurang merangsang proses berfikir dan memotivasi siswa untuk belajar. Adapun, model kelas rangkap menjadi alternatif yang sangat cocok untuk mengatasi persoalan pendidikan dan pembelajaran di daerah terpencil yang memiliki berbagai keterbatasan dalam hal jumlah guru, jumlah murid, maupun sarana prasarana. Model kelas rangkap memiliki berbagai keunggulan terutama yang terkait dengan efisiensi dan efektifitas, nilai pedagogis seperti kemandirian dan kerja kelompok, pengembangan sosialisasi dan prinsip kebersamaan. Oleh karena itu, kelas rangkap sebagai alternatif model pengembangan kurikulum pendidikan layanan khusus untuk daerah terpencil akan sangat bermanfaat, jika diterapkan secara nasional.	II III III III III	III III
15. Definisi Kelas Rangkap Pengajaran Kelas Rangkap atau Multigrade Teaching merupakan strategi pengajaran dengan menerapkan perangkapan kelas (dua kelas atau lebih) dan perbedaan tingkat kemampuan yang dilakukan oleh seorang guru dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah beberapa hal rambu-rambu yang menyangkut kelas rangkap : • Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa siswa peserta didik yang berasal dari dua atau tiga tingkatan kelas yang berbeda, dengan satu guru di dalam kelas yang sama, dan berlangsung selama satu tahun ajaran penuh. • Kelas rangkap merupakan gabungan dari dua atau tiga tingkatan kelas yang berbeda dengan satu guru di dalam kelas yang sama dan berlangsung selama satu tahun ajaran penuh. • Kelas rangkap merupakan gabungan dari beberapa tingkatan kelas yang berdekatan, misalnya kelas 1 dan 2, atau kelas 4, 5 dan 6. • Di dalam kelas rangkap, terjadi penggabungan siswa peserta didik yang memiliki usia dan kemampuan yang berbeda • Di dalam kelas rangkap, siswa peserta didik belajar bersama-sama dengan satu guru, meskipun mereka memiliki usia dan	II II II II II	II II II II II

untuk meningkatkan prestasi belajar. Sedangkan tujuan yang non akademik menyangkut pembinaan kepribadian peserta didik. b. Tujuan khusus 1) Meningkatkan pengetahuan dan prestasi belajar peserta didik. 2) Menumbuhkembangkan sikap, minat dan perilaku kewirausahaan serta kemandirian bagi peserta didik. (3) 3) Mengembangkan potensi dan ketrampilan peserta didik terutama yang terkait dengan ketrampilan vokasional (2) 4) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi bagi peserta didik. 5) Menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien.	II	III
17. Pengorganisasian Kurikulum Kelas Rangkap Dalam mengembangkan kurikulumnya, setiap sekolah haruslah mengacu kepada Standar Isi Nasional. Oleh sebab itu, sebelum mengembangkan KTSP (kurikulum sekolah), setiap guru atau pengembang kurikulum disarankan untuk membaca dengan seksama Standar Isi Nasional. Model Pengorganisasian Kurikulum untuk kelas rangkap banyak variasinya, antara lain: ▪ model pengajaran kelas rangkap dengan dua tingkatan kelas, mengembangkan satu atau dua mata pelajaran yang sama atau berbeda yang dilaksanakan dalam satu ruang; ▪ model pengajaran kelas rangkap dengan tiga tingkatan kelas atau lebih, mengembangkan satu atau lebih mata pelajaran yang sama atau berbeda yang dilaksanakan dalam satu ruang. Pemilihan model pengorganisasian kurikulum tergantung pada kondisi dan kebutuhan sekolah setempat.	II II II	II II II
Langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum sekolah: a. Pemetaan Kompetensi Tujuan dari pemetaan adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang kompetensi yang terdapat di dalam standar isi. Pengorganisasian kompetensi dilakukan untuk kebutuhan satu semester atau satu tahun. Proses pemetaan mencakup pengkajian kompetensi untuk kelas-kelas yang terdapat di kelas rangkap, misalnya kelas 1 dan 2, kelas 3 dan 4, atau kelas 5 dan 6. Apabila kelas rangkap terdiri dari 3 kelas, misalnya kelas 4, 5 dan 6, maka pengkajian dan pemetaan kompetensi untuk ketiga kelas tersebut. Pemetaan dilakukan dengan mencari kompetensi dasar yang secara konsep keilmuan serupa atau berkesinambungan untuk semua pelajaran dari kelas yang berbeda. Penggabungan dilakukan setelah membaca kompetensi dasar dan melihat perkiraan tema yang dapat memayunginya. b. Penetapan Tema Dari hasil pengkajian dan pemetaan Kompetensi Dasar, tentukan tema yang sesuai untuk setiap mata pelajaran pada kelas rangkap dan alokasi waktunya. Untuk satu semester, biasanya dihasilkan sekitar lima tema dengan masing-masing tema berkisar antara 3-4 minggu. 18. Pengembangan Silabus Silabus dibuat untuk dua kelas atau tiga kelas sekaligus (sesuai dengan kelas rangkap yang diinginkan). Silabus berisi pengalaman belajar atau kegiatan belajar. Banyaknya jenis kegiatan belajar tergantung dari lamanya waktu untuk setiap tema. Sebelum membuat silabus, pengembang kurikulum hendaknya menganalisa jumlah pertemuan untuk setiap mata pelajaran. Apabila mata pelajaran tertentu memiliki 2 jam pelajaran (satu kali	II	II

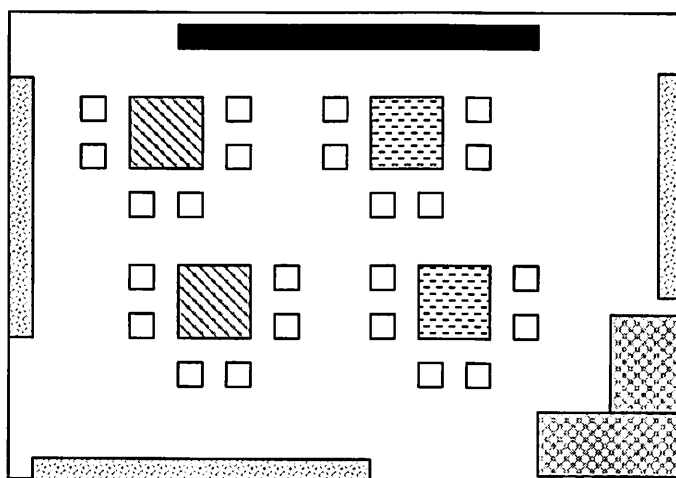
pertemuan dalam satu minggu), maka pengembang kurikulum hendaknya mencari satu kegiatan pokok/kegiatan besaran untuk satu kali pertemuan tersebut. Misalnya, pada tema AKU membutuhkan waktu 4 minggu, maka untuk mata pelajaran matematika yang memiliki alokasi waktu 4 jam pelajaran/minggu (2x pertemuan) dibutuhkan 2 kegiatan pokok/kegiatan besaran dalam satu minggu, sehingga jika untuk 4 minggu dibutuhkan 8 kegiatan pokok/kegiatan besaran (2 pertemuan x 4 minggu = 8 kegiatan pokok/kegiatan besaran). Dalam pengembangan silabus, pengembang kurikulum perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: penentuan kebutuhan siswa, kompetensi dasar, pembuatan indikator, penentuan kegiatan belajar dan bagaimana pengurutannya, serta jenis asesmen/penilaian yang akan dipergunakan. Usahakan agar asesmen yang digunakan adalah kumpulan dari berbagai jenis asesmen yang beragam sehingga mencerminkan asesmen yang berimbang (antara test dan non tes). Penyusunan Indikator dimaksudkan untuk membantu guru agar pengajarannya tidak keluar arah sehingga kompetensi dapat tercapai. Selain itu, indikator merupakan petunjuk bagi guru untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. 19. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran berisi langkah-langkah pembelajaran secara rinci dan merupakan pengembangan dari silabus yang ada. Inti dari isi RPP adalah penjabaran kegiatan pokok dari silabus menjadi kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Strategi pengajaran dan pengorganisasian siswa juga harus nampak dalam RPP.		
20. Strategi Pengajaran Kelas Rangkap Di dalam kelas rangkap, siswa yang dihadapi tentunya beragam, baik dari segi usia, kemampuan ataupun , keterampilannya , maupun jumlah siswa per kelasnya. Banyak strategi yang dapat digunakan di dalam kelas rangkap. Namun sebaiknya strategi yang dipilih adalah strategi yang tidak memisahkan para peserta didik dari dua atau tiga tingkatan kelas yang berbeda. Tujuan dari menggabungkan dua atau tiga tingkatan kelas dalam satu ruangan adalah untuk mengembangkan keterampilan sosialisasi mereka dan menciptakan komunitas belajar di dalam kelas. Oleh sebab itu, keterlibatan seluruh peserta didik di dalam kelas dalam kegiatan pembelajaran adalah sangat penting. Strategi pengajaran hendaknya mencerminkan pembelajaran yang berbeda dan PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan). (ditambahkan tentang bagaimana strategi jika jumlah siswanya banyak per kelasnya) Pembelajaran berbeda dimaksudkan untuk mengakomodir menjembatani perbedaan yang ada di dalam kelas. Perbedaan ini meliputi perbedaan keterampilan, pengetahuan atau pun sikap. Sedangkan pembelajaran PAKEM dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kaya serta mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.	III III III III III	III III III III III
Berikut beberapa strategi pengajaran di kelas rangkap : 21. Lakukan, Bicarakan, Catat Strategi ini mengajak seluruh siswa dari kelas yang berbeda untuk ikut melebur jadi satu. Gambaran berikut memberikan penjelasan bagaimana strategi ini dilaksanakan di dalam kelas:		

<u>Lakukan</u> Guru merencanakan suatu kegiatan di mana siswa secara aktif ikut terlibat, misalnya, kunjungan ke suatu pabrik, mengobservasi jenis-jenis transportasi yang lewat di depan sekolah, mengamati danau di lingkungan sekitar. Guru memberi informasi kepada siswa apa yang harus dilakukan atau dicari sebelum dan selama kegiatan. <u>Bicarakan</u> Siswa menceritakan apa yang telah dilihat dan dialaminya kepada teman atau guru sebelum atau setelah memiliki pengalaman barunya. Guru menggunakan kegiatan ini untuk menambahkan hal-hal penting yang bermanfaat untuk kegiatan <i>pencatatan</i>. Pemberian pertanyaan terbuka memberi kesempatan kepada siswa untuk berfikir kritis dan kreatif. <u>Catat</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan individu. Setelah melakukan kegiatan dan mendiskusikannya, setiap peserta didik dapat mengerjakan tugas berupa pelaporan, menulis hasil observasi atau pun lainnya. Di dalam kegiatan ini, pembelajaran berbeda sangatlah bermanfaat karena guru dapat membedakan tugas berdasarkan tingkat kesulitannya. Siswa kelas 1 misalnya, tentunya bentuk penugasannya akan berbeda dengan bentuk penugasan untuk siswa kelas 2. Ke tiga kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam satu kali tatap muka pembelajaran. Gambaran berikut memberikan penjelasan tentang pelaksanaan strategi di atas.  <pre> graph TD A[Lakukan] --> B[Bicarakan] B --> C[Catat] C --> A </pre>		
22. Satu Masukan, Banyak Keluaran Sama halnya dengan strategi sebelumnya, strategi berikut pun memberi kesempatan kepada semua siswa untuk ikut terlibat dan strategi mencerminkan PAKEM serta pembelajaran yang berbeda. Strategi ini meminta seluruh siswa melakukan hal yang sama, namun jenis pelaporannya dapat berbeda-beda. <u>Satu Masukan</u> Siswa melakukan kegiatan bersama-sama, misalnya kunjungan ke pasar untuk melakukan wawancara. <u>Banyak Keluaran</u> Siswa dibagi beberapa kelompok. Pengelompokkan dapat dilihat dari kelas yang berbeda atau pun dari kemampuan yang berbeda. Setiap kelompok harus menghasilkan produk yang berbeda sesuai dengan yang ditugaskan, misalnya: ▪ Kelompok 1. menuliskan hasil wawancara dengan penjual lewat tulisan ▪ Kelompok 2. membuat grafik barang yang dijual ▪ Kelompok 3. membuat denah pasar Guru menentukan, kegiatan mana yang cocok untuk kelas tertentu.		
23. Pengorganisasian Kelas pada Kelas Rangkap Pengaturan kelas rangkap sebenarnya tidak jauh berbeda dengan		

kelas PAKEM lainnya. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pengaturan kelas rangkap, yaitu pengaturan fisik kelas dan pengaturan siswa dalam belajar.		
---	--	--

[illegible]

Berikut gambaran pengaturan kelas untuk kelas rangkap:



■ = papan tulis, □ = pajangan siswa, □ = pusat belajar,

▨ = siswa kelas 1, ▩ = siswa kelas 2

7. Struktur dan Muatan Kurikulum pada Kelas Rangkap Struktur dan Muatan Kurikulum pada Kelas Rangkap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSNP. Struktur dan Muatan Kurikulum yang meliputi: mata pelajaran, muatan lokal, pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, pada kelas rangkap dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh BSNP. Namun, ketentuan struktur kurikulum dan muatan kurikulum, seperti pada mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri untuk kelas rangkap perlu dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi, tujuan, visi dan kebutuhan sekolah masing-masing di daerah terpencil tersebut.	IIII III	III II
---	------------------------	----------------------

Berikut adalah struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh BSNP.

KOMPONEN	KELAS & ALOKASI WAKTU			
A. Mata Pelajaran	I	II	III	IV, V, VI
1. Pendidikan Agama	TEMATIK			3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni budaya dan keterampilan				4
8. Pnjas & Olahraga Kesehatan				4
B. Muatan Lokal				2
C. Pengembangan Diri				2*)
Jumlah	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Berikut adalah struktur kurikulum pada kelas rangkap dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSNP.

KOMPONEN	KELAS & ALOKASI WAKTU			
A. Mata Pelajaran	I	II	III	IV, V, VI
1. Pendidikan Agama	TEMATIK Kelas Rangkap (multigrade)			3
2. Pendidikan Kewarganegaraan				2
3. Bahasa Indonesia				5
4. Matematika				5
5. Ilmu Pengetahuan Alam				4
6. Ilmu Pengetahuan Sosial				3
7. Seni budaya dan keterampilan				4
8. Penjas & Olahraga Kesehatan				4
B. Muatan Lokal	2	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)	2*)
JUMLAH	26	27	28	32

*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Untuk sekolah dengan kelas rangkap, sebelum menentukan banyaknya jam belajar, haruslah ditentukan terlebih dahulu kelas-kelas mana yang akan disatukan. Kemudian, tentukan alokasi waktu belajarnya setelah melakukan langkah-langkah pengembangan pengorganisasian kurikulum. Untuk sekolah dengan kelas rangkap hendaknya terlebih dahulu menetapkan kelas-kelas mana yang akan disatukan. Setelah ditentukan temanya dan melakukan langkah-langkah pengembangan pengorganisasian kurikulum, kemudian menetapkan jam belajar/alokasi waktu setiap mata pelajaran pada kelas rendah (kelas 1, kelas 2, kelas 3). Namun, untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 tetap menggunakan alokasi waktu per minggu yang telah ditetapkan BSNP. Hendaknya kelas-kelas yang disatukan memiliki jumlah jam belajar yang sama untuk setiap mata pelajarannya pada masing-masing tingkatan kelas tersebut. Misalnya, kelas yang disatukan adalah kelas 1 dan 2, maka jam belajar untuk setiap mata pelajarannya dalam satu minggu hendaknya sama. 24. Muatan Lokal Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah dan global. Substansi muatan lokal ditetapkan oleh satuan pendidikan, dengan prinsip untuk membekali siswa peserta didik agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan sehingga dapat menghadapi tantangan daya saing lokal dan global. Substansi muatan lokal dapat diperuntukan untuk satu semester atau satu tahun saja sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga substansi muatan lokal amat bervariasi. Satuan pendidikan diperkenankan mengembangkan muatan lokal lebih dari satu pelajaran. Jika muatan lokal lebih dari satu, maka dapat ditetapkan seperti berikut: 1. Muatan lokal wajib yang lebih menekankan pada kebutuhan dan keunggulan daerah setempat. 2. Muatan lokal pilihan lebih menekankan pada kebutuhan dan keunggulan global dalam rangka menghadapi tantangan kehidupan global.	II	
	II	
	II	II
25. Pengembangan Diri Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk		

mengembangkan diri melalui kegiatan pembiasaan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan di daerah terpencil selain untuk mengembangkan potensi diri peserta didik juga menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan penanaman nilai-nilai kebangsaan (karakteristik kebangsaan). Kegiatan pengembangan diri pada kelas rangkap sama dengan sekolah reguler umumnya, yaitu dapat dilakukan antara lain melalui: 26. Kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi, kehidupan sosial, penanaman nilai-nilai kebangsaan, belajar, dan pengembangan karier peserta didik. 27. Kegiatan ekstrakurikuler yang lebih mengembangkan diri pada bakat, minat dan pengembangan kecakapan hidup (life skill) peserta didik. Misalnya kegiatan pramuka, kepemimpinan, kelompok ilmiah remaja, maupun yang sifatnya keterampilan khusus seperti membuat kerajinan, industri rumah tangga, budidaya tanaman, dst. Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.	I II II	II II II
28. PENILAIAN Penilaian dengan pengajaran kelas rangkap adalah sesuai dengan makna penilaian sesungguhnya yang merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa. Proses analisis dan penaksiran tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga dapat menjadi informasi yang bermakna bagi guru dalam melakukan umpan balik demi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator, dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. 1. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. 2. Penilaian harus bersifat komprehensif, menilai ranah kognitif, afektif sampai dengan psikomotorik peserta didik. 3. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi peserta didik terhadap kelompoknya. 4. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh peserta didik. 5. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian	III	II

kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan. 6. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.		
BAB IV PENUTUP Daerah terpencil merupakan daerah yang memiliki berbagai keterbatasan sehingga penduduknya cenderung terisolasi dan tertinggal termasuk tertinggal dalam bidang pendidikan. Kalau hal ini terus berkepanjangan akan menimbulkan kerawanan nasional. Itulah sebabnya pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan daerah-daerah terpencil melalui kegiatan pendidikan. Untuk itu, perlu dirancang pengembangan model kurikulum pendidikan layanan khusus untuk daerah terpencil. Sesuai kondisi daerah terpencil dengan letak permukiman penduduk yang berjauhan/terpencar penduduknya yang sedikit, berarti peserta didiknya juga sangat sedikit, maka perlu dirancang model pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Model pengajaran kelas rangkap menjadi alternatif yang sangat cocok untuk mengatasi persoalan pendidikan dan pembelajaran di daerah terpencil tersebut. Model pengajaran kelas rangkap memiliki berbagai keunggulan terutama yang terkait dengan efisiensi dan efektivitas, pengembangan sosialisasi dan prinsip kebersamaan. Oleh karena itu kelas rangkap penting untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil secara nasional.	IIII	IIII

Dari 25 responden hanya 6 responden yang memberikan masukan pada bab I dan bab II dari draf model kurikulum PLK terpencil ini. 19 responden lainnya tidak memberi masukan dikarenakan mereka menganggap bahwa draf model ini sudah baik, jelas dan dapat dipahami. Secara umum, responden yang memberikan pendapat pada model kurikulum PLK terpencil ini menyatakan bahwa bab I dan bab II sudah baik dan jelas, baik itu dari sistematika maupun isinya. Responden hanya memberikan masukan pada ketepatan penggunaan bahasa Indonesia, seperti penulisan kalimat, kesalahan pengetikkan dan penggunaan bahasa asing agar diterjemahkan ke bahasa Indonesia, serta kekonsistenan dalam menggunakan kata "siswa-anak-dan peserta didik".

Pada bab III ini, juga hanya 6 responden yang memberikan masukan, 19 responden lainnya tidak memberi masukan pada draf model kurikulum PLK terpencil ini. Responden yang tidak memberi masukan mengatakan bahwa bab III ini sudah baik dan jelas serta dapat dipahami.

Adapun, responden yang memberikan pendapat pada bab III model kurikulum PLK terpencil ini juga sangat kritis. Berikut ini hal-hal yang perlu diperbaiki pada bab III:

- Pada sub bab B abtara judul dengan isi masih kurang nyambung dan sepertinya masih belum selesai. Mungkin akan lebih baik jika sub bab N digabung dengan sub bab C.
- Tujuan khusus pada sub bab C urutannya perlu direvisi.
- Pada Strategi Pengajaran Kelas Rangkap hendaknya dicarikan solusi bagaimana jika jumlah siswanya banyak per kelasnya.
- Tabel Struktur dan Muatan Kurikulum pada Kelas Rangkap kurang tepat, karena tematik pada kelas rangkap berbeda dengan tematik biasa, hendaknya diperbaiki.
- Pada uraian tentang pengembangan diri hendaknya ditambahkan tentang penanaman nilai-nilai kebangsaan (karakteristik kebangsaan)

Masukkan untuk perbaikan lainnya pada bab III ini berupa ketepatan penggunaan bahasa Indonesia, seperti penulisan kalimat, kesalahan pengetikan, penggunaan bahasa asing agar diterjemahkan ke bahasa Indonesia, serta kekonsistenan dalam menggunakan kata “siswa-anak-dan peserta didik”.

Sedangkan, masukkan pada bab IV hanya sedikit yaitu kesalahan ketatabahasa pada paragraf 2.

2. DATA KUESIONER

Data kuesioner ini dijangar melalui pengisian kuesioner oleh responden dan juga melalui diskusi fokus. Data kuesioner ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang keterbacaan, keterlaksanaan, permasalahan/kendala implementasi terhadap model, kesesuaian KTSP dengan model dan saran/rekomendasi. Berikut ini hasil data kuesioner:

JAWABAN KUESIONER	DAERAH (N=25 org)	
	CARINGIN	SEKAYAM
1. Bagaimana kesesuaian sistematika penulisan dari model kurikulum ini?		
▪ Sistematika sudah tepat dan baik	12 (48%)	10 (40%)
▪ Pada bab 3 bagian B, antara isi dan judul sub bab kurang sesuai		2 (8%)
▪ Sebaiknya ada lampiran tersendiri untuk model kurikulum kelas rangkap	4 (16%)	5 (20%)
▪ Sebaiknya KTSP terpencil bukan sebagai lampiran	4 (16%)	4 (16%)
▪ Lampirannya ada dua yaitu: 1) pengembangan silabus, rpp dan LKS model kurikulum; dan 2) KTSP daerah terpencil	5 (20%)	4 (16%)
2. Bagaimana pemahaman dari segi bahasa penulisan dari model kurikulum ini?		

▪ Bahasa penulisan sudah baik dan sederhana	12 (48%)	14 (56%)
▪ Masih ada bahasa yang sulit dipahami, sebaiknya disederhanakan ke dalam bahasa Indonesia yang lebih dikenal oleh guru di daerah terpencil	8 (32%)	7 (28%)
▪ Penggunaan bahasa asing sebaiknya di terjemahkan ke bahasa Indonesia	5 (20%)	4 (16%)

Secara umum dari aspek keterbacaan model kurikulum pendidikan layanan khusus daerah terpencil ini sudah baik. Bahasa penulisan pada model ini sederhana dan mudah dipahami, namun penggunaan bahasa asing atau saduran bahasa asing hendaknya dicari padanan kata ke dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya yang dapat dipahami oleh para praktisi pendidikan di lapangan. Untuk sistematika secara umum juga sudah baik dan runtun, namun pada bab 3 bagian B antara isi dan judul sub bab kurang sesuai, sehingga perlu ditelaah kembali baik secara konsep keilmuan.

JAWABAN KUESIONER	DAERAH (N=25 org)	
	CARINGIN	SEKAYAM
3. Apakah model kurikulum ini dapat dilaksanakan/diterapkan di sekolah terpencil? Uraikan jawabannya!		
▪ Dapat, karena sesuai dengan karakteristik daerah terpencil	12 (48%)	6 (24%)
▪ Dapat, karena rata-rata di sini kekurangan guru sehingga bisa kelas rangkap	3 (12%)	2 (8%)
▪ Dapat, jika ada dukungan dan kerjasama dari pihak dinas pendidikan daerah dengan guru sekolah terpencil secara berkesinambungan	4 (16%)	2 (8%)
▪ Dapat, karena dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sendiri	6 (24%)	4 (16%)
▪ Dapat, karena selama ini di daerah terpencil sudah menggunakan kelas rangkap tetapi strategi pengajarannya tetap untuk masing-masing kelas	0	2 (8%)
4. Jika tidak dapat dilaksanakan, mengapa?		
▪ Karena tergantung pada guru kesiapan dan kemampuan guru yang selama ini sangat jarang mendapat pelatihan	4 (16%)	2 (8%)
▪ Kurang dukungan dari pihak birokrasi (dinas pendidikan setempat)	0	1 (4%)
▪ Sarana pengajaran tidak memadai sulit untuk dilaksanakan	2 (8%)	3 (12%)
▪ Luas kelas kurang besar sehingga sulit untuk menggabungkan murid dua kelas dalam satu kelas (apalagi tiga kelas amat tidak memungkinkan) jika jumlah muridnya	0	1 (4%)

banyak		
▪ Adanya standarisasi kelulusan akan menyulitkan dalam pelaksanaannya	0	1 (4%)
▪ Sulit melayani keragaman siswa di dalam kelas yang besar	0	1 (4%)

Secara umum responden berpendapat bahwa model ini dapat dilaksanakan di sekolah dengan alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan karakteristik daerah terpencil
- Dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah
- Perlu kerjasama yang berkesinambungan antara dinas pendidikan dengan sekolah
- Sesuai karena jumlah guru yang terbatas
- Sebagian sekolah di daerah terpencil sudah kelas rangkap tetapi strategi pengajarannya masih masing-masing kelas.

Namun demikian ada sebagian responden ($\pm 36\%$) menjawab bahwa model ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut:

- Tergantung pada kesiapan dan kemampuan guru mengajar
- Sarana pengajaran yang terbatas
- Kurang dukungan dari pihak birokrasi (dinas pendidikan setempat)
- Jumlah murid banyak dan luas kelas terbatas
- Sulit melayani keragaman siswa di kelas yang besar
- Diberlakukannya standarisasi kelulusan sehingga akan menyulitkan dalam pelaksanaannya

Adapun kendala-kendala/permasalahan yang timbul dalam melaksanakan/ menerapkan model kurikulum ini menurut responden seperti berikut:

JAWABAN KUESIONER	DAERAH (N=25 org)	
	CARINGIN	SEKAYAM
5. Apa yang menjadi kendala dalam melaksanakan/menerapkan model kurikulum pendidikan layanan khusus untuk daerah terpencil ini di sekolah?		
▪ Tergantung pada kesiapan sumber daya manusia (guru) dalam melaksanakan model ini	3 (12%)	2 (8%)
▪ Adanya pendapat lebih baik ke pesantren daripada kesekolah umum, karena daerahnya sangat agamis	2 (8%)	0
▪ Jika menggunakan model kelas rangkap, karena anak akan mendapat pembelajaran 2 kali yaitu saat siswa kelas 1 naik ke kelas 2, ia akan tetap berada dalam satu kelas rangkap yang sama.	2 (8%)	1 (4%)
▪ Besarnya rasa gotong royong di kelas sehingga cenderung adik kelas dibantu	1 (4%)	2 (8%)
▪ Guru perlu waktu banyak untuk pekerjaan administrasi sekolah	5 (20%)	4 (16%)

▪ Minimnya pengetahuan dan kurangnya kreativitas guru dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran	2 (8%)	3 (12%)
▪ Sulitnya menjalin kerjasama dengan orangtua dalam bidang pendidikan karena kondisi sosial ekonomi orang tua yang rendah sehingga lebih mementingkan untuk mencari nafkah keluarganya	3 (12%)	3 (12%)
▪ Ruangan kelas kurang memadai untuk kelas rangkap dengan jumlah murid yang banyak	3 (12%)	3 (12%)
▪ Kurangnya pembinaan pada guru terpencil secara berkesinambungan dari dinas setempat untuk program pelaksanaan model kurikulum ini	5 (20%)	5 (20%)
▪ Adat istiadat setempat, perilaku kebiasaan hidup daerah pedesaan yang sulit diubah (anak bekerja saat musim panen/menggembala ternak/mengasuh adik; anak tidak merasakan pentingnya sekolah karena sudah bisa mencari uang sendiri)	5 (20%)	4 (16%)
▪ Jika UAS dibuat oleh dinas pendidikan propinsi	4 (16%)	3 (12%)

Adapun pendapat responden tentang KTSP yang merupakan lampiran pada model ini secara umum berpendapat sudah sesuai.

JAWABAN KUESIONER	DAERAH (N=25 org)	
	CARINGIN	SEKAYAM
7. Apakah contoh KTSP yang dilampirkan sudah sesuai untuk model kurikulum pendidikan layanan khusus bagi daerah terpencil? Berikan masukkannya!		
▪ Sudah sesuai dengan kondisi lingkungan	9 (36%)	8 (32%)
▪ Sudah sesuai, hanya perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing	6 (24%)	5 (20%)
▪ Sudah sesuai, karena terperinci dan jelas	10 (40%)	12 (48%)

Berikut ini merupakan saran yang diberikan oleh responden terhadap model kurikulum pendidikan layanan khusus daerah terpencil:

JAWABAN KUESIONER	DAERAH (N=25 org)	
	CARINGIN	SEKAYAM
6. Berikan saran terhadap model kurikulum pendidikan layanan khusus untuk daerah terpencil.		
▪ Model ini belum mantap betul dalam pbm, evaluasi, kenaikan kelas.	2 (8%)	1 (4%)
▪ Model ini tdk hanya utk daerah terpencil tetapi utk sekolah yang kekurangan guru, ruang belajar dan kurang murid.	2 (8%)	0

▪ Memonitor pelaksanaan model ini secara terprogram	3 (12%)	2 (8%)
▪ Pendanaan utk pelaksanaan model ini (khusus utk pengajarnya)	2 (8%)	2 (8%)
▪ Perlu dipikirkan cara bagaimana mengatasi keadaan guru sedikit sedangkan muridnya banyak	0	2 (8%)
▪ Perlu kelayakan sarana prasarana dan sumber belajar lainnya dalam menerapkan model ini	3 (12%)	4 (16%)
▪ Perlu pelatihan untuk penerapan dengan model kurikulum kelas rangkap	5 (20%)	4 (16%)
▪ Hendaknya diberikan contoh-contoh modul pengajaran kelas rangkap lengkap dengan lembar kerja siswa untuk guru.	3 (12%)	5 (20%)
▪ Supaya model kurikulum ini disosialisasikan pada sekolah-sekolah terpencil	10 (40%)	9 (36%)
▪ Cocok hanya memerlukan keuletan dan semangat bagi guru untuk melaksanakan model ini	1 (4%)	0

**Hasil Analisis Uji Coba
Model Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus
bagi Peserta dengan Sosial Ekonomi Rendah
Di Boyolali dan Kupang**

No	BOYOLALI	No	NUSA TENGGARA TIMUR
1	Keterbacaan - Dari 25 responden (100%) menyatakan bahwa setelah membaca dokumen kurikulum dan contoh KTSP mengatakan paham tentang model kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan social ekonomi rendah. -	1	Keterbacaan - Dari 25 responden (100%) menyatakan bahwa setelah membaca dokumen kurikulum dan contoh KTSP mengatakan paham tentang model kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan social ekonomi rendah.
2.	Keterlaksanaan - Dari 25 responden, sebagian besar (24 responden) menyatakan kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan sosial ekonomi rendah dapat dilaksanakan, 1 orang menyatakan tidak dapat dilaksanakan karena kemampuan ekonomi siswa heterogen.	2.	Keterlaksanaan - Dari 25 responden , sebagian besar (22 responden) menyatakan kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan sosial ekonomi rendah dapat dilaksanakan, 3 orang menyatakan tidak dapat dilaksanakan karena sebagian besar peserta didik kondisi ekonomi termasuk sedang dan tinggi.
3.	Permasalahan - Kurangnya sarana dan prasarana yang belum memadai (antara lain dana, tempat, tenaga pembimbing) - Kriteria untuk lulus ujian nasional sama, sehingga apabila lebih menekankan kepada life skill sehingga konsentrasi untuk persiapan UAN kurang dikhawatirkan tidak lulus ujian - Minimnya layanan dan kesadaran	3.	Permasalahan - Jumlah peserta didik digolongkan dalam kategori yang cukup mampu dan sebagian kecil siswa tidak mampu(kondisi ekonomi peserta didik heterogen) - Dari sisi guru kemampuan mengintegrasikan materi pembelajaran yang bersifat layanan khusus masih rendah - secara psikologis siswa yang tergolong sosial ekonomi rendah

	terhadap pendidikan - Kemampuan pengajar yang kurang memadai untuk skill tertentu sehingga siswa kurang matang/mahir - Motivasi anak dan orang tua kurang		terganggu karena sepertinya harga diri direndahkan, - Minimnya buku sumber (referensi), - Kemampuan guru yang kurang mendukung, - Kondisi psikologis anak yang kurang mampu akan merasa rendah diri, - Guru mata pelajaran harus disiapkan secara khusus untuk dapat memberikan pelayanan khusus bagi anak kurang mampu, - Jika peserta didik dengan sosial ekonomi rendah hanya sebagian kecil, bagaimana pelayanan yang diberikan bagi sebagian besar peserta didik lainnya, apakah disatukan dengan yang rendah, - Tidak semua guru mampu mengintegrasikan model ini ke dalam KTSP, - Jumlah rombongan belajar yang besar, - Sekolah tidak mempunyai ruang keterampilan, - Waktu dan kemampuan dalam penerapannya, - Tempat untuk menyalurkan hasil-hasil keterampilannya, - Jumlah rombongan belajar setiap kelas 50 siswa, - Kondisi sekolah yang belum memadai (lahan, dana, dan alokasi waktu pembelajaran) yang terbatas, - Belum adanya tempat untuk menyalurkan hasil karya,
--	---	--	---

4.	Kesesuaian Contoh KTSP dengan Model Kurikulum. - Dari 25 responden (25%) menyatakan bahwa contoh KTSP terlampir dalam dokumen sesuai dengan model kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan social ekonomi rendah	4.	Kesesuaian Contoh KTSP dengan Model Kurikulum. - Dari 25 responden (25%) menyatakan bahwa contoh KTSP terlampir dalam dokumen sesuai dengan model kurikulum pendidikan layanan khusus SMP bagi peserta didik dengan sosial ekonomi rendah
5.	Rekomendasi/Masukan - Dibutuhkan tenaga-tenaga yang siap pakai/siap kerja. - Perlu ada pembedaan model ketrampilan yang diberikan pada peserta didik sosial ekonomi rendah dengan yang umum. - Penambahan waktu belajar - Syarat nilai untuk lulus diturunkan, UN bukan merupakan syarat kelulusan, dan diberikan tenaga yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. - Dalam kurikulum dimasukkan materi sejarah/riwayat orang-orang berhasil (sukses) berwirausaha. - Boleh menambah waktu - Program ini dapat dilaksanakan di setiap sekolah, akan tetapi tidak semua diperlakukan sama, sehingga ada keterampilan pilihan yang lain. - Pemberian pelatihan kepada guru. - Pembiayaan pendidikan terus	5.	Rekomendasi/Masukan - Dibutuhkan persiapan yang mantap karena harus diawali dengan pendataan siswa secara akurat serta penentuan bentuk layanan khusus apa yang tepat untuk dilakukan sesuai dengan kondisi sekolah/lingkungan. - Perlu menambah/membuka sekolah kerajinan agar pelajaran keterampilan lebih terfokus, - Meningkatkan pelatihan guru-guru keterampilan, - Penambahan jumlah jam pada mata pelajaran Muatan Lokal dan Pengembangan Diri, - Diklat bagi kepala sekolah tentang pengembangan kurikulum yang berbasis layanan khusus bagi siswa dengan social ekonomi rendah, - Layanan khusus sebaiknya dijadikan mata pelajaran tersendiri (khusus keterampilan), - Tipe layanan ini lebih cocok untuk SMP Plus dan Satuan Pendidikan Kejuruan,.

	diupayakan di tingkatkan secara signifikan dan penuntasan wajar pendidikan dasar 9 tahun. - Perlu disediakan dari pemerintah untuk teknisi/guru pembimbing pada life skill tertentu.		- Model layanan ini lebih cocok difokuskan pada daerah bencana. - Dibutuhkan bantuan dana. - Model ini diperuntukkan di daerah-daerah yang memiliki kharakteristik khusus (pertanian, nelayan, industri) dan lebih tepat untuk sekolah-sekolah khusus (sekolah keterampilan), - Pemerintah ikut memikirkan/menyiapkan tempat untuk menyalurkan hasil karya siswa, - Perlu sosialisasi model kurikulum ini ke sekolah-sekolah. - Lingkungan dipakai sebagai sumber belajar (keunggulan/potensi lingkungan), - Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung perlu ditingkatkan, - Meningkatkan minat dan bakat siswa melalui berbagai kompetisi/lomba,
--	---	--	--

HASIL ANALISIS

UJICoba KURIKULUM SEKOLAH PERBATASAN

HASIL ANALISIS KALIMANTAN TIMUR

BAB I

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	Sesuai untuk daerah perbatasan
2	v	-	-
3	v	-	-
4	v	-	-
5	v	-	-
6	-	v	Kurangnya tenaga pengajar , transportasi sulit
7	v	-	Agar segera dilaksanakan
8	v	-	-
9	v	-	Sudah bagus mencakup latar belakang, landasan hukum,tujuan dan ruang lingkup.
10	v	-	-
11	v	-	-
12	v	-	-
13	v	-	Perlu adanya pengembangan sehingga tercapai pendidikan nasional untuk mengejar ketertinggalan wilayah perbatasan
14	v	-	Masih banyak keterlambatan sarana informasi, penunjang pendidikan dari pusat
15	v	-	Diharapkan pengalaman belajarnya dapat secara aktif, kreatif dan menyenangkan
16	v	-	Diharapkan pengalaman belajarnya dapat secara aktif, kreatif dan menyenangkan
17	v	-	-
18	v	-	-
19	v	-	Karena daerah perbatasan mempunyai budaya dan harga diri dan bila hal ini dilaksanakan akan mengangkat mutu pendidikan Indonesia dimata internasional. Karena perbatasan cerminan bagi Indonesia (NKRI)

Kesimpulan :

SESUAI	TIDAK SESUAI
-Sesuai untuk daerah perbatasan yang mempunyai akulturasi budaya. -Sudah mencakup latar belakang, landasan hokum, tujuan dan ruang lingkup. -Diharapkan adanya tenaga pengajar yang cukup, penunjang pendidikan , informasi dan transportasi yang memadai . -Perlu adanya pengembangan pendidikan daerah perbatasan	-

BAB II

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	Karena guru sedikit, minat guru menjadi rendah
2	v	-	Masyarakat perbatasan diuntungkan melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan dua Negara.
3	v	-	-
4	v	-	-
5	v	-	-
6	v	-	-
7	v	-	Karena rawan maka perlu peningkatan keamanan
8	v	-	-
9	v	-	Perlu peningkatan sarana transportasi
10	v	-	-
11	v	-	-
12	v	-	-
13	v	-	Pembangunan di Indonesia lambat sedangkan pembangunan di Malaysia maju
14	v	-	Disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik daerah perbatasan
15	v	-	-
16	v	-	-
17	v	-	-
18	v	-	Perlu pendidikan yang memperkuat iman dan taqwa, social dan kerja sama untuk memperkokoh NKRI
19	v	-	-

Kesimpulan:

SESUAI	TIDAK SESUAI
Sudah sesuai namun perlu memperhatikan: -Peningkatan keamanan karena daerah perbatasan rawan -Peningkatan kegiatan ekonomi dan perdangan -Peningkatan sarana transportasi -Penyesuaian perkembangan peserta didik didaerah perbatasan -Pendidikan yang memperkokoh NKRI melalui peningkatan iman,taqwa,social dan kerjasama.	-

BAB III

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	-
2	v	-	Perlu adanya alat peraga karena alat peraga sulit didapat
3	v	-	-
4	v	-	-
5	v	-	-
6	v	-	-
7	v	-	Perlu adanya penyesuaian dengan daerah perbatasan
8	v	-	-
9	v	-	Dapat dipergunakan untuk daerah perbatasan dan SD terpencil
10	v	-	Untuk Mulok cocok bahasa inggris, namun tidak ada tenaga pengajarnya
11	v	-	-
12	v	-	Dapat dipergunakan didaerah perbatasan
13	v	-	-
14	v	-	-
15	v	-	Harus ada perbedaan yang jelas: Kelas 1-3 pembelajaran tematik Kelas 4-6 Pembelajaran pendekatan pembelajaran
16	v	-	Kelas 1-3 pembelajaran tematik Kelas 4-6 Pembelajaran pendekatan pembelajaran
17	v	-	-
18	v	-	-Perlunya pemahaman agar ada minat baca -Kekurangan bahan ajar
19	v	-	Karena KTSP mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan

Kesimpulan:

SESUAI	TIDAK SESUAI
-KTSP mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan dan dapat dipergunakan untuk daerah perbatasan dan daerah terpencil -Mulok yang cocok untuk SD perbatasan Negara adalah bahasa Inggris namun tenaga pengajar belum ada -perlu adanya alat peraga dn bahan ajar serta pemahaman untuk menarik minat baca -perlu adanya perbedaan yang jelas dalam pembelajaran: 1. kelas 1-3 Tematik 2. kelas 4-6 pendekatan mata pelajaran 3. untuk daerah yang mengalami kekurangan guru menggunakan pembelajaran kelas rangkap	-

HASIL ANALISA ATAMBUA - NTT

BAB I

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	Sesuai dengan kondisi sekolah
2	v	-	-
3	v	-	Hubungan antar Negara yang dilanggar
4	v	-	Melihat latar belakang landasan hokum dan ruang lingkup
5	v	-	Mengacu pada UU RI No 32 Th 2004 tentang otonomi daerah .(pemerintah daerah)
6	-	v	Karena buku-buku sumber sangat kurang dan yang ada tidak sesuai dengan KTSP.
7	v	-	Landasan hukum, tujuan dan ruang lingkupnya sama
8	v	-	-
9	v	-	Sesuai dengan kondisi daerah perbatasan
10	v	-	-
11	v	-	Karena termasuk didaerah perbatasan
12	v	-	-
13	v	-	Kondisi sekarang belum ada jaringan listrik, Agar diusahakan jaringan listrik
14	v	-	-
15	v	-	Wilayah perbatasan memiliki keterkaitan dan kesamaan budaya antar kedua negara
16	v	-	Sangat menunjang proses pendidikan dan pengajaran
17	v	-	Ditinjau dari latar belakang, landasan hukum,tujuan dan ruang lingkup
18	v	-	-
19	v	-	-
20	v	-	-
21	v	-	-
22	v	-	-
23	v	-	-

Kesimpulan :

SESUAI	TIDAK SESUAI
Model KTSP mengacu pada UU no. 32 Th 2004 tentang pemerintah daerah, serta melihat latar belakang, landasan hukum , ruang lingkup dan kondisi daerah perbatasan yang pada kenyataannya di wilayah perbatasan tersebut memiliki keterkaitan dan kesamaan budaya antar kedua Negara.	- Kekurangan buku-buku sumber yang mengacu pada KTSP - Untuk Mulok Komputer belum bisa dilaksanakan karena jaringan listrik belum ada.

BAB II

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	Ada tambahan Mulok pilihan
2	v	-	-
3	v	-	Visi dan misi disesuaikan dengan kultur budaya setempat
4	v	-	-
5	v	-	-
6	v	-	Ada tambahan Mulok pilihan (computer)
7	v	-	-
8	v	-	-
9	v	-	Ada pendekatan keamanan yang terjamin tetapi pendekatan kesejahteraan belum memadai
10	v	-	Masih perlu dukungan dari kepala daerah dan peran serta masyarakat
11	v	-	-
12	v	-	Masih ada, bahkan banyak anak-anak terlantar yang belum mendapat pendidikan dasar
13	v	-	-
14	v	-	-
15	v	-	-
16	v	-	-
17	v	-	-
18	v	-	KTSP untuk daerah perbatasan belum disinggung
19	v	-	Perlu diupayakan suatu bentuk yang sesuai dengan kondisi, situasi daerah tersebut
20	v	-	-
21	v	-	-
22	v	-	Perlu ada penyesuaian dengan bahasa ibu untuk proses pengajaran
23	v	-	-

Kesimpulan:

SESUAI	TIDAK SESUAI
Pada dasarnya sudah sesuai dengan karakteristik daerah perbatasan . Namun ada beberapa sekolah yang belum ada listrik sehingga Mulok pilihan untuk Komputer belum bisa dilaksanakan .Penggunaan bahasa ibu masih perlu dipertimbangkan . Perlu ada pendekatan keamanan,kesejahteraan dan dukungan dari kepala daerah dan peran serta masyarakat.	-

BAB III

No	SESUAI	TIDAK SESUAI	ALASAN
1	v	-	Perlu ditambah dengan latar belakang
2	v	-	-
3	v	-	Ditambah latar belakangnya, agama katolik ditambah
4	v	-	-
5	v	-	Struktur kurikulum bagus, Muloknya disesuaikan
6	v	-	Rambu-rambu pembuatan KTSP sesuai
7	v	-	Latar belakang sama
8	v	-	Agar dibedakan visi dan misinya sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah yang berbatasan dengan Negara lain
9	v	-	Tambah latar belakang sesuai dengan KTSP
10	v	-	Sesuai dengan sosial budaya daerah
11	v	-	Sesuai dengan latar belakang
12	v	-	Mata pelajaran sesuai hanya beda di Mulok
13	v	-	Sama dengan contoh model kurikulum diperbatasan
14	v	-	-
15	v	-	-
16	v	-	Agar visi dan misi disesuaikan dengan keadaan sekolah dan atas kesepakatan antara kepala sekolah dan dewan guru
17	v	-	-
18	v	-	-
19	v	-	-
20	v	-	Ditambah latar belakang
21	v	-	-
22	v	-	-
23	v	-	-

Kesimpulan:

SESUAI	TIDAK SESUAI
-Struktur kurikulum, rambu-rambu pembuatan KTSP, sosial budayanya sudah sesuai dengan daerah perbatasan -visi dan misinya disesuaikan dengan kondisi sekolah -tambah latar belakang -Untuk agama katolik agar disertakan -Mulok disesuaikan dengan daerah setempat	-

